



JURNAL ILMIAH

GEMA PERENCANA

Volume 3, Nomor 2, September - Desember 2024

Halaman 167 - 340

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	i - x
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING MELALUI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KELUARGA Muamar Haikal	167 - 188
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM REVITALISASI KUA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Abdul Haris Khoirul Alam	189 - 218
KEBIJAKAN PENYULUHAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK MELALUI PENDEKATAN DAKWAH DI KABUPATEN MAMUJU, SULAWESI BARAT Rustan	219 - 240
PERENCANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS DARING PADA DESA TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI KABUPATEN SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT M. Syahir	241 - 258
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH BERBASIS <i>HYBRID LEARNING</i> Lalu Kiagus Hartawan	259 - 276
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA BOS MADRASAH SWASTA DI DIPA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA Danang Sulistya Hady	277 - 298

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN STATUS
AKREDITASI PROGRAM STUDI DI IAIN PALANGKA RAYA

Ibnu Hasan Karbila ----- 299 - 322

STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Arie Nova R. ----- 323 - 340



SALAM REDAKSI

Pembaca Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA yang terhormat,

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa-Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayat-Nya, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** ini dapat terbit kembali sebagai Edisi Lanjutan, yaitu: **Volume 3 Nomor 2, September-Desember 2024**. Setelah mendapatkan E-ISSN (*Electronic-International Standard Serial Number*), saat ini juga sudah memperoleh P-ISSN (*Printing-International Standard Serial Number*) dari Pusat Nasional ISSN Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** telah terdaftar dan mendapatkan Nomor *Digital Object Identifier* (DOI) dari **The Crossref**.

Jurnal ini dalam pengelolaannya menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA*. Kami berharap, pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih cepat, lebih efektif, dan lebih luas melalui media *online*. Di samping itu, Jurnal ini tetap dicetak secara *hardcopy*, walaupun dengan jumlah halaman dan tiras yang terbatas.

Pada **Volume 3 Nomor 2, September-Desember 2024** ini, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** menerbitkan 8 (delapan) artikel, yang kesemuanya berasal dari para Perencana di lingkungan Kementerian Agama RI dan sudah dinyatakan lulus Hasil Kerja Minimal (HKM) sebagai salah satu syarat penilaian untuk mengikuti Ujian Kompetensi (Ujikom) yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas RI. Kedelapan artikel tersebut tersaji sesuai dengan ruang lingkup (*scope and focus*) yang telah ditetapkan Tim Editorial **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA**. Artikel-artikel yang tampil dalam Jurnal ini lebih menekankan pada kajian “Kebijakan Perencanaan” (*Policy Paper*) bidang: Sosial, Ekonomi, Spasial, dan Pendidikan, dalam perspektif Agama dan Keagamaan.

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan keagamaan maupun pengembangan pengetahuan di bidang kegiatan masyarakat.

Selamat membaca!

Jakarta, Desember 2024

Dewan Redaksi



LEMBAR ABSTRAK

Muamar Haikal

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Email: haikalmoeamar@gmail.com

INGGRIS

OPTIMIZING OF STUNTING REDUCTION POLICIES THROUGH MARRIAGE AND FAMILY GUIDANCE PROGRAMS

This Policy Paper describes that the main actors in the stunting reduction policy in Indonesia are families through Marriage and Family Guidance in Islamic, Christian, Catholic, Hindu, Buddhist, and Confucian communities. Based on the evaluation and findings, a review of this policy and program is needed. The findings in this paper indicate that there is potential for ineffectiveness in the stunting reduction program. This condition is caused because the strategic targets are not supported by performance indicators, resulting in suboptimal achievement of performance targets. In addition, the stunting reduction budget is also spent more on indirect spending, so that the direct impact is not felt by the community. The purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of the Ministry of Religious Affairs's policy on the marriage and family guidance program in reducing stunting rates. This paper uses a qualitative method with literature studies, statistical data analysis, and interviews with stakeholders. The results show that there are various factors that cause the performance of the stunting reduction budget to be suboptimal, namely the inaccurate preparation of performance indicators and the lack of coordination of budget planning with related work units. For this reason, the author recommends the importance of (1) providing training for employees or human resources in the planning bureau or work units related to planning and budgeting at the Ministry of Religious Affairs related to stunting reduction; (2) carrying out coordination and collaboration related to budget planning by involving the Planning Bureau with related work units regarding the suitability of budget logic and performance indicators in reducing stunting; (3) create policies on reducing stunting at the Ministry of Religious Affairs by optimizing the Marriage and Family Guidance program through rational, effective, accurate, and targeted budget acceleration, so that the impact can be felt directly by the community.

Keywords: Policy, Stunting, Marriage and Family Guidance, Planning, Budgeting

INDONESIA

OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING MELALUI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DAN KELUARGA

Policy Paper ini menguraikan bahwa aktor utama dalam kebijakan penurunan stunting di Indonesia adalah keluarga melalui Bimbingan Perkawinan dan Keluarga pada masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan evaluasi dan temuan yang ada, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program ini. Temuan dalam penulisan ini menunjukkan bahwa potensi ineffectiveness dalam program penurunan stunting. Kondisi ini disebabkan karena sasaran strategis tidak didukung indikator kinerja, sehingga menyebabkan pencapaian target kinerja tidak optimal. Selain itu, anggaran penurunan stunting juga lebih banyak dihabiskan untuk belanja tidak langsung, sehingga dampak langsung tidak dirasakan oleh masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi sejauhmana efektivitas kebijakan Kementerian Agama terhadap program bimbingan perkawinan dan keluarga dalam menurunkan angka stunting. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, analisis data statistik, dan wawancara dengan stakeholders. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kinerja anggaran penurunan stunting tidak optimal, yaitu kurang tepatnya penyusunan indikator kinerja dan masih kurangnya koordinasi perencanaan anggaran dengan Satuan Kerja terkait. Untuk itu, penulis merekomendasikan pentingnya: (1) memberikan pelatihan bagi pegawai atau sumber daya manusia di Biro Perencanaan maupun Satuan Kerja yang berhubungan dengan perencanaan dan anggaran di Kementerian Agama terkait penurunan stunting; (2) melakukan koordinasi dan kolaborasi terkait perencanaan anggaran dengan melibatkan Biro Perencanaan dengan Satuan Kerja terkait mengenai kesesuaian logika anggaran dan indikator kinerja dalam penurunan stunting; (3) membuat kebijakan tentang penurunan stunting pada Kementerian Agama dengan mengoptimalkan program Bimbingan Perkawinan dan Keluarga melalui percepatan anggaran yang rasional, efektif, akurat, dan tepat sasaran, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Stunting, Bimbingan Perkawinan dan Keluarga, Perencanaan, Anggaran

Abdul Haris Khoirul Alam

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Email: hariesgita@gmail.com

**EVALUATION AND DEVELOPMENT
OF KUA REVITALIZATION PROGRAM
AS AN EFFORT TO IMPROVE THE
QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE**

This Policy Paper describes that public services at the Religious Affairs Office (KUA) have received a lot of corrections from the community in West Nusa Tenggara Province. About this, KUA services will be improved by using KUA revitalization. However, the implementation of KUA revitalization has many obstacles that cannot be resolved in a short time. The purpose of this analysis is to evaluate and develop the KUA revitalization program in West Nusa Tenggara Province. This analysis was carried out using a qualitative approach, and data analysis using a descriptive approach. The analysis results are: 1) The KUA revitalization program is not only an Islamic Guidance program but a comprehensive Ministry of Religious Affairs program. 2) KUA revitalization is not only a change in mindset and culture set but also an agent of change. 3) The main change in KUA revitalization is in changes in human resources. 4) Improvement of facilities and infrastructure is carried out based on the priority scale of KUA conditions. 5) It is necessary to make changes to the rules that are linear with the KUA revitalization program, especially the rules related to SBSN so that they can synergize to accelerate the progress of KUA revitalization. The conclusion is that the KUA revitalization program will be successful if there is cooperation between all work units within the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: KUA Revitalization, Mindset, Culture Set, KUA Infrastructure, KUA Services

**EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM REVITALISASI KUA
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN MASYARAKAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Policy Paper ini menguraikan bahwa layanan masyarakat pada Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan layanan yang banyak mendapatkan koreksi dari masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka layanan KUA akan ditingkatkan dengan menggunakan revitalisasi KUA. Namun pelaksanaan revitalisasi KUA terdapat banyak kendala yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Adapun tujuan analisa ini adalah untuk melakukan evaluasi dan pengembangan program revitalisasi KUA pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Hasil analisa adalah: 1) Program revitalisasi KUA bukan hanya program Bimas Islam tetapi program Kementerian Agama secara komprehensif. 2) Revitalisasi KUA bukan hanya perubahan mindset dan culture set, tetapi juga agent of change. 3) Perubahan Utama pada revitalisasi KUA adalah pada perubahan sumber daya manusia. 4) Peningkatan sarana prasarana dilakukan berdasarkan skala prioritas kondisi KUA. 5) Perlu dilakukan perubahan aturan yang linier dengan program revitalisasi KUA khususnya aturan terkait SBSN sehingga dapat bersinergi untuk mempercepat progress revitalisasi KUA. Kesimpulannya bahwa program revitalisasi KUA akan berhasil jika terdapat kerja sama seluruh satuan kerja dalam Kementerian Agama.

Kata Kunci: Revitalisasi KUA, Mindset, Culture Set, Sarana Prasarana KUA, Pelayanan KUA

Rustan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat

Email: rustan@gmail.com

***FAMILY COUNSELING POLICY IN
FORMING CHILDREN'S CHARACTER
THROUGH A DAKWAH APPROACH IN
MAMUJU DISTRICT, WEST SULAWESI***

This Policy Paper describes the family counseling policy to shape children's character through a da'wah approach by Religious Counselors in Mamuju Regency, West Sulawesi. This article aims to present a family counseling program that has a strategic role in forming children's character by assisting Islamic Religious Counselors to parents using a da'wah approach. This study uses qualitative methods in managing data obtained through interviews and direct observation, both from primary and secondary sources, then conducting in-depth interviews and field observations which are analyzed in detail regarding the role of Islamic Religious Counselors in carrying out child counseling. This Policy Paper reveals that family counseling policies aim to shape children's character by adopting a da'wah approach that includes forms of da'wah, such as bil-hikmah, bil-mau'idzah, and bil-mujjadi, as taught in the QS. an-Nahl [16]: 125. These findings imply that family counselors need to take the role of positive models who are full of empathy and promote honesty and patience in their words and actions. In addition, persuasive guidance is considered an effective approach to forming children's character through da'wah.

Keywords: *Da'wah, Family Counseling, Child Character, Policy*

***KEBIJAKAN PENYULUHAN KELUARGA
DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER
ANAK MELALUI PENDEKATAN
DAKWAH DI KABUPATEN MAMUJU,
SULAWESI BARAT***

*Policy Paper ini menguraikan tentang kebijakan penyuluhan keluarga dalam upaya pembentukan karakter anak melalui pendekatan dakwah oleh Penyuluh Agama di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetengahkan program penyuluhan keluarga yang memiliki peranan strategis pada pembentukan karakter anak melalui pendampingan Penyuluh Agama Islam terhadap orang tua dengan pendekatan dakwah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dalam mengelola data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung, baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan pengamatan lapangan yang dianalisis secara terperinci mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan anak. Makalah kebijakan ini mengungkapkan bahwa kebijakan penyuluhan keluarga yang bertujuan membentuk karakter anak dengan mengadopsi pendekatan dakwah yang mencakup bentuk-bentuk dakwah, seperti: *bil-hikmah*, *bil-mau'idzah*, dan *bil-mujadalah*, sebagaimana yang diajarkan dalam QS. an-Nahl [16]: 125. Implikasi temuan ini adalah bahwa penyuluhan keluarga perlu mengambil peran sebagai model positif yang penuh empati serta mempromosikan kejujuran dan kesabaran dalam perkataan dan tindakan mereka. Selain itu, bimbingan persuasif dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam mencapai tujuan pembentukan karakter anak melalui dakwah.*

Kata Kunci: *Dakwah, Penyuluhan Keluarga, Karakter Anak, Kebijakan*

M. Syahir

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Email: emsyahirlajut78@gmail.com

**ONLINE-BASED LEARNING PLANNING
IN UNDERREGARDED, FRONTLINE,
AND OUTER VILLAGES IN SUMBAWA
DISTRICT, WEST NUSA TENGGARA**

This Policy Paper reviews that learning in remote, outermost, and underdeveloped villages (3T) is hampered by accessibility issues. Accessibility is not only in terms of regional reach, but also economic, health, and environmental. The existence of accessibility that is considered severe has an impact on the quality of education which is categorized as weak. This problem is followed up by providing additional internet facilities to support information and communication facilities, but internet utilization has not been maximized. The purpose of this analysis is: 1) to describe and analyze the problem of Weaknesses in the use of internet technology as a learning tool, and 2) to analyze appropriate educational planning for remote villages. This analysis was conducted using a descriptive qualitative approach. The results of this analysis are: 1) the use of the internet to support the learning process is considered not optimal due to the human resources of teachers and madrasah leaders who do not understand online learning, 2) the educational planning process is carried out as a solution to the Weaknesses of implementation, namely by using synoptic theory and improving teacher pedagogical competence. The conclusion is that educational planning needs to be done to improve the output and outcome of the planned program.

Keywords: Online learning, Synoptic Theory, Pedagogy, Remote Areas, Outermost Areas, Frontier Areas, Underdeveloped Areas

**PERENCANAAN PEMBELAJARAN
BERBASIS DARING PADA DESA
TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN
TERLUAR DI KABUPATEN SUMBAWA
NUSA TENGGARA BARAT**

Policy Paper ini mengulas bahwa pembelajaran di desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terkendala oleh masalah aksesibilitas. Aksesibilitas tidak hanya dari segi keterjangkauan wilayah, tetapi juga ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Adanya aksesibilitas yang dinilai parah berdampak pada mutu pendidikan yang dikategorikan lemah. Masalah ini ditindaklanjuti dengan menyediakan fasilitas internet tambahan untuk mendukung sarana informasi dan komunikasi, namun pemanfaatan internet belum maksimal. Tujuan dari analisis ini adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis masalah kelemahan dalam pemanfaatan teknologi internet sebagai sarana pembelajaran, dan 2) melakukan analisis perencanaan pendidikan yang tepat untuk desa tertinggal. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari analisis ini adalah: 1) pemanfaatan internet untuk mendukung proses pembelajaran dinilai belum optimal karena faktor SDM guru dan pimpinan madrasah yang belum memahami pembelajaran daring, 2) proses perencanaan pendidikan dilakukan sebagai solusi dari kelemahan implementasi, yaitu dengan menggunakan teori sinoptik dan peningkatan kompetensi pedagogi guru. Kesimpulan perencanaan pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan output dan outcome dari program yang telah direncanakan.

Kata Kunci: Pembelajaran Daring, Teori Sinoptik, Pedagogik, Daerah Terpencil, Daerah Terluar, Daerah Terdepan, Daerah Tertinggal

Lalu Kiagus Hartawan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Email: lalukiagusheartawan@gmail.com

**POLICY DEVELOPMENT OF
PREMARRIAGE GUIDANCE BASED ON
HYBRID LEARNING**

This article reviews premarital marriage guidance for prospective brides and grooms as one of the government's priority programs that provide knowledge and skills for married couples to build harmonious and prosperous households that do not run effectively and efficiently between the output and outcome produced and those intended to be achieved in the implementation of premarital marriage guidance at the Ministry of Religion of West Nusa Tenggara Province based on hybrid learning, due to factors such as the quality of human resources, premarital marriage guidance materials, and limited access to technological devices and the internet. In this regard, in analyzing this problem, the author uses a qualitative approach method. The results of the analysis are: First, the quality of guidance requires a different approach, because the literacy skills of the participants in the guidance vary, and most still have difficulty understanding and following the marriage guidance material provided. Second, the level of public trust, especially in traditional communities that still believe in local wisdom patrons, who find it difficult to apply knowledge according to the marriage guidance material they obtain into their married lives. Third, not all prospective couples have adequate access to technological devices and the internet to follow the hybrid learning method, especially in remote areas or with limited digital infrastructure. The conclusion is that pre-marital marriage guidance for prospective brides and grooms needs to be developed to minimize the occurrence of divorce and build a harmonious family.

Keywords: *Bride and Groom, Pre-Wedding, Marriage Guidance, Hybrid learning*

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA
NIKAH BERBASIS HYBRID LEARNING**

Artikel ini mengulas tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi pasangan suami-istri membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak berjalan efektif dan efisien antara *output* dan *outcome* yang dihasilkan dengan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berbasis *hybrid learning*, karena faktor kualitas sumber daya manusia, materi bimbingan perkawinan pra nikah, dan keterbatasan akses ke perangkat teknologi dan internet. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menganalisis masalah ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun hasil analisisnya adalah: *Pertama*, kualitas bimbingan memerlukan pendekatan yang berbeda, karena kemampuan literasi masyarakat peserta bimbingan yang bervariasi, di mana sebagian besar masih kesulitan dalam memahami dan mengikuti materi bimbingan perkawinan yang diberikan. *Kedua*, tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat tradisional yang masih meyakini patron kearifan hidup lokal, yang begitu sulit untuk menerapkan pengetahuan sesuai materi bimbingan perkawinan yang mereka peroleh ke dalam kehidupan pernikahan mereka. *Ketiga*, tidak semua calon pasangan memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi dan internet untuk mengikuti metode *hybrid learning*, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur digital yang terbatas. Kesimpulannya bahwa bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin perlu mendapat pengembangan untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan membangun keluarga sakinah.

Kata Kunci: *Calon Pengantin, Pra Nikah, Bimbingan Perkawinan, Hybrid learning*

Danang Sulistya Hady

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

Email: danang_internisti@yahoo.co.uk

**PRIVATE MADRASAH BOSS FUND
PLANNING AND BUDGET POLICY AT
DIPA DIRECTORATE GENERAL OF
ISLAMIC EDUCATION MINISTRY OF
RELIGIOUS AFFAIRS**

This Policy Paper examines the BOS fund planning and budgeting policies of private madrasahs with a focus on four main issues, namely: (1) transparency and accountability of fund management, (2) suitability of allocation to madrasah needs, (3) timeliness of fund disbursement, and (4) capacity of human resources managing BOS in madrasahs. This paper uses qualitative methods with a case study approach and policy analysis methods, including SWOT analysis, to identify internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) factors that influence the effectiveness of the policy. The results show that although the BOS policy has made a positive contribution to increasing access to education, there are still several weaknesses that need to be addressed. Lack of transparency and accountability, mismatched allocation, late disbursement, and limited human resource capacity are the main challenges. Therefore, this study recommends several improvements, including: (1) strengthening the online information and publication system to increase transparency, (2) revising the fund allocation formula, and strengthening the process of preparing the Madrasah Work Plan and Budget (RKAM) based on needs, (3) simplifying the administrative process and improving coordination between agencies to accelerate fund disbursement, and (4) increasing human resource capacity through training and mentoring. Thus, this study concludes that comprehensive and sustainable improvement of BOS fund governance is significant in ensuring that the funds are used effectively and efficiently so that they can provide optimal impact on improving the quality of education in private madrasahs. Periodic policy evaluation is also needed to identify new problems and formulate appropriate solutions.

Keywords: Private Madrasah, School Operational Assistance, Budgeting, Planning, Transparency, Accountability, Education Quality

**KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DANA BOS
MADRASAH SWASTA DI DIPA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA**

*Policy Paper ini mengkaji kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta dengan fokus pada empat isu utama, yaitu: (1) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, (2) kesesuaian alokasi dengan kebutuhan madrasah, (3) ketepatan waktu pencairan dana, dan (4) kapasitas sumber daya manusia pengelola BOS di madrasah. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus (*case study*) dan metode analisis kebijakan, termasuk analisis SWOT, untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan BOS telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan, ternyata masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, ketidaksesuaian alokasi, keterlambatan pencairan, dan kapasitas SDM yang terbatas merupakan tantangan utama. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan beberapa perbaikan, antara lain: (1) penguatan sistem informasi dan publikasi online untuk meningkatkan transparansi, (2) revisi formula alokasi dana dan penguatan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) berbasis kebutuhan, (3) penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan koordinasi antarinstitusi untuk mempercepat pencairan dana, serta (4) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, kajian ini menyimpulkan bahwa perbaikan tata kelola dana BOS secara komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan mutu pendidikan di madrasah swasta. Evaluasi kebijakan secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan baru dan merumuskan solusi yang tepat.*

Kata Kunci: Madrasah Swasta, Bantuan Operasional Sekolah, Penganggaran, Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas, Mutu Pendidikan

Ibnu Hasan Karbila
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Email: Ibnu.hasano6@yahoo.com

**STRATEGIES AND POLICIES IN
IMPROVING THE ACCREDITATION
STATUS OF STUDY PROGRAMS AT IAIN
PALANGKA RAYA**

This Policy Paper explains that guaranteeing the quality of education in higher education is an absolute thing that must be implemented on an ongoing basis, one of the efforts is through the implementation of accreditation, which can provide benefits to many parties; starting from the government, prospective students or parents, the national and international job market, funding organizations, and for the universities or study programs concerned. IAIN Palangka Raya is the only State Islamic Higher Education in Central Kalimantan. However, the number of study programs accredited as Excellent or Very Good has not yet reached 25%. This paper uses a descriptive qualitative method with the research subjects being representatives of the Quality Assurance Institute (LPM), representatives of the study program, and representatives of the Dean, while the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results show that 3 (three) aspects are the main problems of the small number of study programs accredited as Superior at IAIN Palangka Raya, namely: low student standard scores, human resources, and the tri dharma outcomes of higher education. The value of these three criteria can be increased by carrying out budget planning using a bottom-up approach. An alternative policy solution that can be taken is policy making by the Chancellor as the Budget User Authority (KPA), by programming three activities, including implementation of overseas outreach, training in Scopus journal publication techniques, as well as expansion of overseas cooperation and follow-up, especially in the field of research and devotion.

Keywords: Planning, Quality Assurance, Accreditation, Study Program

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM
MENINGKATKAN STATUS AKREDITASI
PROGRAM STUDI DI IAIN PALANGKA
RAYA**

*Policy Paper ini menguraikan bahwa penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi (PT) merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, salah satu upayanya melalui pelaksanaan akreditasi, yang dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, mulai dari pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyalang dana dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan. IAIN Palangka Raya merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Islam Negeri yang ada di Kalimantan Tengah, namun jumlah program studi yang terakreditasi Unggul atau Baik Sekali belum mencapai 25%. Penulisan *Policy Paper* ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah perwakilan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), perwakilan pihak program studi, dan perwakilan pihak Dekanat, sedangkan teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek yang menjadi permasalahan utama dari minimnya program studi yang terakreditasi Unggul di IAIN Palangka Raya adalah rendahnya nilai standar luaran tri dharma perguruan tinggi. Kriteria tersebut nilainya dapat ditingkatkan dengan melakukan perencanaan anggaran melalui pendekatan bottom up yang melibatkan LPM untuk mereview relevansi program kerja program studi dengan sembilan kriteria akreditasi. Alternatif solusi kebijakan yang dapat diambil adalah penyusunan regulasi berupa juknis sistem *reward* untuk meningkatkan motivasi dan menghargai kinerja publikasi dosen dalam meningkatkan luaran tridharma perguruan tinggi.*

Kata Kunci: Perencanaan, Penjaminan Mutu, Akreditasi, Program Studi

Arie Nova R.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara

Email: arienova34@gmail.com

**POLICY STRATEGY FOR DEVELOPING
RELIGIOUS EDUCATION IN
SUPPORTING BORDER AREA
DEVELOPMENT IN NORTH
KALIMANTAN PROVINCE**

This Policy Paper describes that the border areas in North Kalimantan have unique characteristics, in terms of geography, society, culture, and economy. Religious education in this area has a very important role in shaping the character of the community, strengthening national values, and supporting regional development. However, there are several challenges faced in the development of religious education in border areas, such as limited access to educational facilities, lack of qualified teachers, and the influence of foreign cultures. Therefore, religious education can be a catalyst in building a harmonious, tolerant, and competitive society. This paper analyzes the contribution of religious education to the development of border areas and formulates policy strategies that can strengthen the role of religious education in achieving development goals. This article uses a qualitative method that focuses on understanding the meaning and interpretation of social phenomena in border areas, with a descriptive-analytical approach to describe and analyze data in detail and in-depth. The results show that quality religious education can improve the quality of human resources, strengthen national values, and support regional economic development. Moreover, the management of the border area in North Kalimantan which directly borders Malaysia. Due to its proximity, there is significant cross-border interaction and activity among the people living in this area, especially the people in Malinau and Nunukan Regencies. So the role of religious education becomes a strategic significance in the formation of character and the face of the people in this inter-country region.

Keywords: Development, Religious Education, Character, Border Areas, National Values

**STRATEGI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
AGAMA DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN WILAYAH
PERBATASAN DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

Policy Paper ini menguraikan bahwa wilayah perbatasan di Kalimantan Utara memiliki karakteristik unik, baik dari segi geografis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Pendidikan agama di wilayah ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendukung pembangunan daerah. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan agama di wilayah perbatasan, seperti keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta pengaruh budaya luar. Karena itu, pendidikan agama dapat menjadi katalisator dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan berdaya saing. Tulisan ini menganalisis kontribusi pendidikan agama terhadap pembangunan wilayah perbatasan serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat memperkuat peran pendidikan agama dalam mencapai tujuan pembangunan. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi fenomena sosial yang ada di kawasan perbatasan, dengan pendekatan analisis-deskriptif untuk menggambarkan serta menganalisis data secara detail dan mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan agama yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Apalagi pengelolaan kawasan perbatasan di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena kedekatannya, terdapat interaksi dan aktivitas lintas batas yang signifikan di antara masyarakat yang tinggal di kawasan ini, khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Sehingga peran pendidikan agama menjadi signifikansi yang strategis dalam pembentukan karakter dan wajah masyarakat yang ada di kawasan antarnegara ini.

Kata Kunci: Pembangunan, Pendidikan Agama, Karakter, Wilayah Perbatasan, Nilai Kebangsaan